

### BAB III.

## SEJARAH KONFLIK MINORITAS UYGHUR DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH XINJIANG

Dalam bab ini, penulis akan menceritakan tentang bagaimana hubungan pemerintah China dengan Masyarakat etnis Uyghur yang terjadi di wilayah Xinjiang, China. Pembahasan ini juga akan memaparkan sejarah konflik serta berbagai kebijakan pemerintah China terhadap etnis Uyghur. Pada bab ini terdapat berbagai sub bab yang akan menjelaskan keterkaitan diskriminasi HAM yang dialami oleh etnis Uyghur, diantaranya: gambaran umum Xinjiang, kebijakan Strike Hard Campaign, diskriminasi HAM dalam kebijakan kamp-kamp pendidikan ulang.

#### A. Gambaran Umum Xinjiang

Xinjiang menjadi wilayah otonom sejak tahun 1955, dengan mengganti nama menjadi *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR), yang beribukota di Urumqi.

Gambar. XUAR



Dalam sejarahnya, Xinjiang merupakan bagian wilayah yang mengendalikan kunci dari *Silk Road* (Jalur Sutra), sementara itu wilayah Xinjiang merupakan bagian tak terpisahkan dari kereta api yang mengarah ke *Continental Eurasia*. Oleh karena itu, wilayah Xinjiang dianggap sebagai “rumah” dari berbagai keturunan peradaban Turki seperti Kazaks Uyghur, Kirgiz, Tatar dan Uzbek. Di antara jumlah populasi kelompok etnis keturunan Turki di Xinjiang, Uyghur merupakan suku terbanyak yang memiliki banyak bahasa. Dikarenakan letak wilayahnya di Jalur Sutra yang terkenal, Uyghur juga memainkan peran penting dalam pertukaran budaya antara Timur dan Barat, sehingga mereka memiliki budaya dan peradaban yang unik (Wardhani, 2011).

Xinjiang adalah provinsi terbesar China yang diberkahi dengan sumber daya minyak dan gas yang signifikan dan bertindak baik sebagai penyangga strategis dan pintu gerbang ke Asia Tengah, serta provinsi perbatasan dengan Republik Asia Tengah pasca-Soviet, Rusia, Afghanistan dan Pakistan. Selain itu, merupakan wilayah strategis yang tidak hanya dalam hal sumber daya alam dan geostrategic, secara historis melayani sebagai keamanan “zona penyangga” untuk “*China Proper*” dalam melawan invasi berkala oleh gerombolan nomaden. Oleh karena itu, pelestarian Xinjiang membawa simbolis penting bagi Beijing. Stabilitas atau instabilitas di Xinjiang akan memiliki efek langsung pada daerah lain di China. Meskipun hari ini akan menjadi kejadian yang sangat tidak mungkin, jika Xinjiang berhasil memisahkan diri dari China dan memperoleh kemerdekaan, pasti akan mengguncang daerah lain yang memiliki berbagai sejarah panjang perjuangan kemerdekaan (Tukmadiyeva, 2013, p. 92).

Wilayah Xinjiang merupakan daerah yang sepi, pegunungan terjal, dan lembah gurun yang luas. Penduduk asli di wilayah ini sebagian besar para petani dan penggembala (terutama orang Uyghur) mendiami oasis yang terbentang di sepanjang kaki gunung atau menjelajahi dataran gersang untuk mencari padang rumput. Sejak pembentukan kontrol China yang tegas pada tahun 1949, upaya serius telah dilakukan untuk mengintegrasikan ekonomi regional ke dalam perekonomian negara tersebut, dan upaya ini telah disertai dengan peningkatan besar dalam populasi Han (China) di sana. Kebijakan pemerintah China adalah membiarkan kelompok etnis mengembangkan dan mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Namun, sejauh mana kebijakan itu berhasil di Xinjiang telah ditafsirkan dengan berbagai ketegangan etnis, terutama antara Uyghur dan Han. Strategi asimilasi dan isolasionis Beijing mengakibatkan meningkatnya kebencian dan frustrasi umum di antara para Uyghur. Sumber-sumber ketegangan masih banyak dan kompleks, antara lain: imigrasi Han besar-besaran, persepsi diskriminasi sosiopolitik dan ekonomi terhadap Uyghur serta pengurangan drastis bagi kebebasan budaya dan agama Uyghur. Ketegangan antar etnis semakin kuat dari waktu ke waktu, menghasilkan banyak aksi kekerasan yang memuncak dengan kerusuhan Yili pada tahun 1997 (Meyer, 2016).

Pemarjinalan kaum muslim Uyghur oleh pemerintah Tiongkok disebabkan salah satunya karena wilayah Xinjiang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sebelum dijajah oleh pemerintah komunis Tiongkok, pada tahun 1940-an, telah muncul Republik Turkistan Timur di sebagian wilayah Xinjiang yang dianggap sebagai bagian dari hak asasi mereka dalam kemerdekaan. Namun, pendirian Republik Turkistan Timur itu tidak diakui oleh pemerintah komunis

Tiongkok. Tiongkok menganggap Xinjiang adalah bagian dari wilayahnya. Bahkan Mao Zedong langsung mengirimkan tentara ke Xinjiang pada tahun 1949. Puncaknya, pada 1 Oktober 1955, secara resmi Xinjiang dijadikan provinsi dengan status daerah otonomi dengan mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduknya saat itu adalah suku Uyghur (Manmid, 2018).

Kebijakan radikal yang ditetapkan di tempat lain di China selama kebijakan Great Leap Forward (1958–1960) dan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) juga dilaksanakan di Xinjiang. Kekurangan pangan yang disebabkan oleh gangguan-gangguan ini, serta terputusnya hubungan Tiongkok-Soviet pada awal 1960-an telah memicu eksodus massal orang-orang Kazakh pada tahun 1962 ke Kazakhstan (yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet). Ini menyebabkan ketidakstabilan politik besar-besaran dan meningkatnya ketegangan etnis di sepanjang wilayah perbatasan. Setelah Revolusi Kebudayaan, kebijakan politik dan moderasi ekonomi diarahkan pada peningkatan luas dalam mata pencaharian petani dan penggembala untuk stabilitas relatif dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terutama dari akhir 1990-an dengan peningkatan investasi ekonomi di Xinjiang, serta masuknya Han dari bagian lain China. Sementara situasi ekonomi keseluruhan wilayah meningkat sebagai hasilnya, akan tetapi ketidakadilan antara populasi Uyghur dan Han menjadi lebih jelas. Kesenjangan ekonomi ini, bersama dengan ketegangan etnis antara Uyghur dan Han, telah memicu protes dan gangguan Uyghur sesekali (Falkenheim, 2018).

Dalam kasus Xinjiang, ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok etnis minoritas dan populasi Han mungkin merupakan sumber kekerasan politik yang paling sering disebutkan di wilayah ini.

Misalnya, hasil ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan untuk Uyghur dan Han di Xinjiang menunjukkan perbedaan yang nyata. Schuster menemukan bahwa tingkat kematian bayi untuk Han China adalah 13 per 1.000, tetapi 102 per 1.000 untuk Uyghur. yang dicirikan oleh kesenjangan pendapatan perkotaan-pedesaan terburuk, secara keseluruhan terkonsentrasi di barat daya Xinjiang (26 dari 27 kabupaten), di mana etnis minoritas biasanya mencapai lebih dari 90 persen dari total populasi. Menurut Hasmath, China Han memiliki kecenderungan untuk menetap di daerah perkotaan yang lebih kaya, di mana Uyghur cenderung menjadi mayoritas di daerah pedesaan atau daerah perkotaan yang lebih miskin di Xinjiang selatan. Xinjiang mengalami perbedaan pendapatan perkotaan-pedesaan yang meningkat pada 1990-an (Cao, Duan, Liu, A, Piazza, & Wei, 2018).

Uyghur juga menghadapi diskriminasi di pasar kerja perkotaan. Karena Han China lebih dominan di sektor swasta di daerah perkotaan yang lebih memilih mempekerjakan Han China atau etnis minoritas yang dapat berbicara bahasa China dengan baik, banyak iklan pekerjaan secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Han China yang dapat melamar. Dengan demikian orang Uyghur yang telah melalui sistem pendidikan Uyghur memiliki kelemahan yang kuat dalam mencari pekerjaan di sektor swasta. Akibatnya, tingkat pengangguran di kalangan orang Uyghur dilaporkan jauh lebih tinggi daripada orang China Han. Etnis Han dalam kapasitas istimewa sebagai karyawan di perusahaan energi negara, kepala berbagai lembaga pemerintah dan secara besar-besaran di tentara dan polisi (Han, 2010, p. 254). Selain itu etnis Uyghur juga mendapatkan diskriminasi bahasa oleh pemerintahan China. Gardner Bovington, seorang profesor di Universitas

Indiana, menjelaskan bahwa bahasa Uyghur sedang terancam dan mungkin akan musnah. Program pemerintah telah menghapus pengajaran bahasa Uyghur di pendidikan tinggi dan secara sistematis selama beberapa dekade sehingga menekan ekspresi politik Uyghur, bahkan ketika Uyghur tidak senang dengan perlakuan mereka, mereka tidak punya tempat untuk membicarakannya. Jika mereka melakukannya, mereka kemudian dapat didakwa dengan nasionalisme atau etnosentrisme (Lipscomb, 2016).

Uyghur adalah minoritas Muslim Turki yang hidup terutama di wilayah Xinjiang China Barat dan merupakan sekitar empat puluh lima persen dari Xinjiang. Kebebasan beragama mungkin merupakan cara represi yang paling lazim dialami oleh orang Uyghur. Pemerintah China, sementara secara resmi mendeklarasikan semua agama sama dan bebas, akan tetapi terus memberlakukan pembatasan keras terhadap Uyghur. Muslim di Tiongkok harus menanggung label teroris, pelecehan publik, dan peraturan agama yang ketat. Sebagian besar dunia, terutama Amerika Serikat, menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi kaum Uyghur. Sementara orang Uyghur terkadang menggunakan kekerasan berdasar tujuan mereka untuk mempraktikkan agama secara bebas di Tiongkok tanpa takut akan penganiayaan atau kematian (Corradini, 2011, p. 29).

## **B. Kebijakan *Strike Hard Campaign* dan Kontra terorisme**

Pada akhir April 1996, pemerintah China meluncurkan kampanye "*Strike Hard*" pertamanya di Xinjiang. Tujuan kampanye ini tidak hanya untuk menindak hubungan kriminal secara umum, tetapi juga untuk menargetkan para pembangkang politik dan, khususnya, separatis Uyghur. Michael Dillon menulis, "Komite partai Xinjiang secara eksplisit

menghubungkan separatisme dengan apa yang disebutnya sebaga “kegiatan keagamaan yang melanggar hukum” dan meluncurkan kampanye untuk mengurangi efeknya di sekolah, penerbitan, dan di seluruh wilayah. Akibatnya, beberapa organisasi pro-kemerdekaan Uyghur mengklaim bahwa antara bulan April dan Juni 1996, sekitar empat ribu pelajar agama ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp penjara. Ada juga klaim bahwa ribuan orang ditangkap di seluruh wilayah selama kampanye, yang mayoritasnya adalah etnis Uyghur (Han, 2010)

Sebagai bagian dari Kampanye *Strike Hard*, pemerintah lokal telah terlibat dalam beberapa jenis kebijakan seperti: pembakaran literatur terhadap sejarah bangsa Uyghur, penangkapan dan penahanan penulis dan cendekiawan Uyghur, pelarangan musik tradisional yang bernuansa Islam, dan melarang pengajaran dalam bahasa Uyghur di Universitas Xinjiang, universitas terbesar di wilayah tersebut. Insiden pembakaran literatur budaya tersebut seolah-olah diarahkan kepada literatur yang berisikan konten independensi dan separatisme, hanya beberapa literatur budaya Uyghur yang dianggap tidak provokatif yang tidak ikut dibakar (Wibisana & Sudarman, n.d.). Daftar penangkapan dan hukuman dalam rangka “*Strike Hard Campign*” ini meliputi (Human Rights Watch, 2001):

- a. Di Aksu, 186 orang ditangkap termasuk orang yang diduga dapat membahayakan keamanan negara. Selain itu penyitaan terhadap publikasi keagamaan illegal.
- b. Di Atush, Akqi dan Akto, dua puluh empat orang dijatuhi hukuman publik termasuk dua orang yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan sabotase ketertiban umum dan stabilitas sosial. Oleh karenanya sepuluh ribu orang

menghadiri unjuk rasa dalam menentang hukuman publik tersebut.

- c. Di ibukota Urumqi, delapan orang yang dituduh memiliki “stabilitas sosial sangat terancam punah” dijatuhi hukuman penjara antara empat dan tiga belas tahun.

Disamping itu sejak 1998, tuduhan keterlibatan Uyghur dalam kegiatan teroris telah menjadi hal biasa di Kirgistan dan Kazakhstan. Yang paling serius dari keprihatinan ini adalah penculikan seorang pengusaha China (2000), serangan terhadap delegasi China di Bishkek, dan pembunuhan seorang diplomat senior Tiongkok di sebuah mobil Mercedes dengan seorang pengusaha Uyghur pada tahun 2002. Selain itu, tiga tokoh masyarakat Uyghur yang terkenal terbunuh antara tahun 1998 dan 2001. Pers yang dikontrol pemerintah di Asia Tengah sering menuduh keterlibatan orang Uyghur dalam pembunuhan ini dan juga dalam pemboman bus dan kebakaran pasar, tetapi laporan ini seringkali bertentangan dan tidak menawarkan apa pun. Penjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengapa teroris Islam Uyghur ingin menyerang pedagang atau pemimpin Uyghur sendiri (Millward, 2004).

Lebih penting lagi, setelah serangan teroris pada bulan 11 September 2001 dan kebijakan "Perang Melawan Teror" yang digulirkan berikutnya, pemerintah Tiongkok mengambil kesempatan untuk memulai kampanye anti terorisme sendiri yang mengaitkan gerakan pro-independensi dan organisasi Uyghur dengan Taliban dan para teroris. Pada Januari 2002, Kantor Informasi Dewan Negara China menerbitkan sebuah dokumen tentang pasukan teroris Turkistan Timur yang beroperasi di China. Hasilnya adalah untuk mengacaukan semua gerakan pro-autonomi dan kemerdekaan Uyghur dengan gerakan teroris Uyghur yang ada, misalnya memberi label

Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur dan Partai Islam Turkestan Timur sebagai organisasi teroris. Pemerintah China secara efektif menggunakan wacana kontraterorisme “perang melawan terorisme” untuk mencap pembangkang politik Uyghur sebagai teroris, sehingga dapat membenarkan gelombang penindasan terhadap para pembangkang Uyghur di seluruh wilayah. Sifat sembarangan dari tindakan ini, yang memperlakukan semua orang Uyghur sebagai separatis atau teroris yang potensial, tentu saja berfungsi untuk mengasingkan lebih banyak etnis Uyghur, dan mungkin telah mendorong banyak orang Uyghur moderat ke dalam kubu ekstremis, yang berkontribusi pada solidaritas kelompok intra (Han, 2010)

Chen Quanguo menjadi Sekretaris Partai Komunis Xinjiang pada Agustus 2016, menggantikan Zhang Chunxian dan meningkatkan kampanye *strike hard*. Di bawah pemerintahannya sebagai Sekretaris Partai Xinjiang, Chen telah mempromosikan perekrutan penduduk lokal ke dalam kepolisian. Dia memulai penindasan terhadap Uyghur, Kazakh dan minoritas lainnya di Xinjiang. Sejak Chen Quanguo dipindahkan dari Tibet untuk memerintah Xinjiang pada Agustus 2016, ia mengawasi pembangunan sistem kamp interniran di luar pengadilan. Dia juga meningkatkan pengawasan terhadap penduduk dengan menggunakan teknologi canggih serta meningkatkan kehadiran polisi, dan mengeluarkan peraturan yang keras untuk membatasi kebebasan berekspresi, beragama dan budaya. Menurut oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, peneliti, dan pakar HAM PBB, setidaknya ratusan ribu atau mungkin dua juta anggota etnis minoritas banyak dari mereka etnis Uyghur dan Kazakh, saat ini ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang" di wilayah tersebut (Shepher, 2018).

Mungkin yang paling inovatif dan mengganggu dari tindakan represif di Xinjiang adalah penggunaan sistem pengawasan massa berteknologi tinggi oleh pemerintah. Pihak berwenang Xinjiang melakukan pengumpulan data biometrik wajib secara massal, seperti sampel suara dan DNA, dan menggunakan kecerdasan buatan dan data besar untuk mengidentifikasi, membuat profil, dan melacak semua orang di Xinjiang. Pihak berwenang telah membayangkan sistem ini sebagai serangkaian "filter", memilih orang-orang dengan perilaku atau karakteristik tertentu yang mereka yakini mengindikasikan ancaman terhadap kekuasaan Partai Komunis di Xinjiang. Sistem-sistem ini juga telah memungkinkan pihak berwenang untuk menerapkan kontrol berbutir halus, membuat orang-orang menghadapi pembatasan yang berbeda tergantung pada tingkat "kepercayaan yang dapat dipercaya" oleh mereka. Pihak berwenang telah berusaha untuk membenarkan perlakuan keras dengan mengatasnamakan menjaga stabilitas dan keamanan di Xinjiang, dengan tindakan untuk "menyerang" mereka yang dianggap teroris dan ekstrimis dengan cara "tepat" dan "mendalam". Pejabat Xinjiang mengklaim akar dari masalah ini adalah berasal dari Muslim Turki. Gagasan-gagasan ini mencakup apa yang oleh pihak berwenang digambarkan sebagai dogma-dogma agama yang ekstrem. Otoritas China bersikeras bahwa kepercayaan dan afinitas semacam itu harus "dikoreksi" atau "diberantas" (Human Rights Watch, 2018).

Kesenjangan ekonomi dan ketegangan etnis telah menyebabkan terjadinya kekerasan diantara kedua etnik. Wabah yang sangat kejam terjadi pada tragedi Urumqi tahun 2009 di mana dilaporkan bahwa hampir 200 orang (kebanyakan Han) terbunuh dan sekitar 1.700 lainnya terluka. Insiden kekerasan

meningkat setelah itu dan termasuk serangan yang menggunakan pisau dan pelaku bom bunuh diri. Otoritas Tiongkok merespons dengan menyalahkan orang-orang Uyghur yang bertanggung jawab atas kerusuhan dengan dugaan sebagai pembangkang dan separatis. Pihak berwenang melakukan tindakan penembakan, penangkapan, dan hukuman penjara yang panjang sampai tahun 2017, ketika pemerintah China memulai tindakan keras menyeluruh terhadap warga Uyghur di Xinjiang (The Editor of Encyclopaedia Britannica, 2019).

Selain itu setelah kerusuhan di Urumqi pada Juli 2009, pemerintah lebih membatasi berbicara, berkumpul, kegiatan keagamaan, informasi, dan komunikasi internasional dalam bidang Uyghur, termasuk memblokir akses internet selama sepuluh bulan. Pemerintah Xinjiang juga telah mengintensifkan penggunaan Mandarin di sekolah-sekolah. Lebih dari 1.000 orang di Xinjiang, termasuk wartawan Uyghur dan webmaster yang telah menerbitkan informasi sensitif, dilaporkan telah ditangkap dalam dua tahun terakhir atas tuduhan terkait dengan keamanan negara (Lum, 2011).

Masalah hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Tiongkok meliputi berbagai aspek termasuk: penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh pasukan keamanan publik, penahanan yang melanggar hukum, penyiksaan tahanan, penggunaan hukum keamanan negara yang sewenang-wenang terhadap para pembangkang politik, kebijakan keluarga berencana yang memaksa, kontrol informasi negara, serta penganiayaan agama dan etnis. Warga Tibet, Muslim Uyghur, dan pengikut Falun Gong telah dipilih secara khusus untuk perlakuan yang keras. Uyghur dan kelompok hak asasi manusia telah mengeluhkan kebijakan agama RRC yang membatasi pelatihan dan peran imam, perayaan Ramadan, dan

partisipasi dalam haji. Keluhan lainnya termasuk kehilangan identitas etnis, diskriminasi ekonomi, dan kurangnya demokrasi. Upaya pemerintah untuk menghancurkan kota tua Kashgar, seolah-olah untuk membangun perumahan baru dan meningkatkan keselamatan publik, telah membuat marah banyak orang Uyghur (Lum, 2011).

Pada Desember 2014, legislator Xinjiang mengeluarkan undang-undang yang melarang penduduk mengenakan burqa di depan umum dalam upaya untuk memperketat kontrolnya atas minoritas Muslim Uyghur Xinjiang. Sebelumnya, negara melarang puasa oleh pegawai negeri sipil Muslim, guru dan siswa selama bulan suci Ramadhan. Sementara umat Muslim memandang langkah-langkah ini sebagai pembatasan identitas agama dan budaya mereka, akan tetapi pemerintah China membela larangan itu demi kesehatan karyawannya. Namun pada kenyataannya, langkah-langkah yang agak sensitif ini merupakan reaksi terhadap eskalasi serangan kekerasan yang dikaitkan dengan Beijing dengan Uyghur (Kam, 2015).

Konflik yang membara di Xinjiang memiliki karakteristik dari benturan peradaban Uyghur Muslim sebagai identitas nasional yang independen terhadap negara China yang kuat. Xinjiang memiliki budaya, bahasa, dan historis bagian dari peradaban Turkish yang berbeda dari peradaban yang berkembang di China. Pertumbuhan nasionalisme Islam sebagai kekuatan transnasional membuat gerakan nasionalis di Xinjiang sangat menantang untuk Beijing. Sejak Gerakan Reformasi Agama Mao tahun 1958, negara telah membatasi akses warga Uyghur ke masjid, praktik penguburan Islam, pengetahuan agama, dan komunitas Muslim lainnya. Hampir tidak ada sekolah Islam di luar kendali pemerintah, imam yang dipilih harus mau berpihak kepada komunis. Anak-anak di

bawah usia 18 tahun dilarang memasuki masjid (Byler, 2019).

Dimensi etnis antara Uyghur dan Han mewujudkan deskripsi yang jauh lebih besar tentang kelompok etnis yang menentang Negara dan semua kebijakan yang diterapkan di wilayah Xinjiang. Konflik tersebut banyak mengangkat tentang perlawanan orang-orang Uyghur di Xinjiang di bawah kekuasaan Tiongkok. Ketegangan konflik kekerasan antara etnis Uyghur dan Han di Urumqi tampaknya bukan yang pertama kali meledak. Pada tahun 1997, orang-orang Tiongkok dikejutkan oleh demonstrasi besar-besaran, kekacauan dan pemboman bus yang melibatkan pemberontak Uyghur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah China dan menuntut untuk sebuah kemerdekaan. Dengan adanya pemberontakan ini pemerintah, menyebutnya sebagai separatisme dan terorisme di wilayah Xinjiang dari komunitas Uyghur yang selanjutnya ditanggapi dengan peningkatan kembali program “Strike Hard” yang kontroversial pada Mei 2014. Kebijakan ini diartikulasikan menjadi serangkaian tindakan disiplin yang ketat terhadap komunitas Uyghur. Pemerintah China mendirikan kamp pendidikan politik dan pusat penahanan praperadilan untuk mendisiplinkan masyarakat Uyghur secara bertahap (Tennang & Ismira, 2019).

Sebagai prosedur ekstra-yudisial, langkah-langkah ini menyangkal dasar hak asasi manusia seperti hak untuk kebebasan dan keamanan, sehingga melanggar hukum internasional. Namun, para pejabat China telah membantah keterlibatannya dalam penahanan sewenang-wenang dan politik indoktrinasi. Menurut mereka, meluncurkan sistem yang mereka gambarkan sebagai “lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan” mewakili lebih luas “upaya de-ekstrifikasi”. Pihak berwenang menjelaskan bahwa penduduk yang telah dipengaruhi oleh ekstrimisme

dikirim ke fasilitas semacam itu untuk 'meningkatkan bahasa China mereka dan memperoleh pengetahuan hukum dan keterampilan kejuruan (Soliev, 2019).

Di tengah tanda-tanda meningkatnya radikalisme, pendekatan kontra-terorisme Beijing yang keras tampaknya gagal atau mengarah pada hasil yang kontra-produktif. Meskipun kecenderungan militan kelompok-kelompok seperti ETIM dan hubungan mereka dengan kelompok-kelompok jihadis di zona konflik lain tidak dapat diabaikan, ada kebutuhan bagi Beijing untuk meninjau kembali akar ketidakpuasan Uyghur yang terletak pada marginalisasi sosial, ekonomi dan agama masyarakat Uyghur di Xinjiang. Keluhan yang melibatkan orang Uyghur di Xinjiang sedang dieksploitasi oleh kelompok-kelompok seperti ETIM dan bahkan Al-Qaeda Central yang dipimpin al-Zawahiri. Radikalisme sebagian besar tampaknya mempengaruhi Investasi besar Beijing untuk keamanan internal dan kehadiran internasionalnya dalam hal perdagangan dan perdagangan, investasi infrastruktur dan inisiatif pembangunan lainnya di negara-negara yang terkena dampak konflik yang sangat mengesankan. Ironisnya, belum ada dividen perdamaian yang jelas untuk China terhadap kepentingannya baik di dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, kebijakan kontraterorisemenya secara konsisten dianggap menindas, baik oleh para militan yang memusuhi China dan oleh banyak anggota komunitas internasional. (Kam, 2015).

Menurut Michael Dillon, pemerintah China telah menerapkan kebijakan asimilasi mengenai budaya Uyghur dalam tiga tren: Pertama, Menurunnya penggunaan bahasa daerah di ranah publik; Kedua, membatasi akses terhadap pendidikan etnis, terutama terlihat dalam pembatasan pendidikan agama atau budaya di daerah otonom. Ketiga, Melembagakan kampanye pendidikan nasionalis patriotik dan China

di forum keagamaan, dan di sekolah dasar dan menengah, dalam upaya negara untuk memperkuat rasa kesetiaan individu minoritas terhadap negara China.

### **C. Diskriminasi HAM dalam Kebijakan Kamp-Kamp Pendidikan Ulang**

Tentang pembangunan kamp Xinjiang, selain lebih dari 1.000 kesaksian dari anggota keluarga Uyghur dan Kazakh yang ditahan, mengungkapkan gambaran yang mengerikan. Banyak orang Uyghur yang hidup dibawah pengawasan China Han yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 1 juta tamu tak diundang untuk membantu militer dan polisi dalam kampanye mereka dengan menduduki rumah-rumah warga Uyghur di kawasan itu dan minoritas Muslim lainnya, serta melakukan program-program indoktrinasi dan pengawasan. Sudah diketahui umum bahwa pemerintah China melanggar hak asasi rakyatnya. Partai Komunis memandang keberadaan kelompok minoritas etnis dan agama di China sebagai ancaman untuk dipadamkan dengan kebijakan *pseudoscientific* tentang agresi psikologis dan fisik (Fuchs, Benaim, & Johnson, 2018).

Pada bulan Agustus 2018, para ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa China menahan hampir satu juta Uyghur lokal dan minoritas Muslim lainnya untuk tujuan 'indoktrinasi politik' yang menyerupai kamp besar-besaran dengan diselimuti kerahasiaan. Laporan-laporan media internasional sejak itu memaksa pihak berwenang Tiongkok untuk mengakui keberadaan jaringan fasilitas massal yang telah dikembangkan di Xinjiang sejak 2017. Para ahli dan pengamat berpendapat bahwa fasilitas ini berfungsi sebagai kamp penahanan sewenang-wenang. Dikarenakan otoritas China telah mengirim orang

Uyghur ke fasilitas semacam itu untuk periode yang tidak terbatas tanpa adanya pengadilan. Dalam kasus-kasus ini, mereka dipaksa untuk menjalani 'pendidikan ulang politik' yang bertujuan menumbuhkan loyalitas kepada partai komunis, dan dalam beberapa kasus, menghadapi penganiayaan (Soliev, 2019).

Kebijakan tersebut menandai perubahan fundamental dalam pemikiran para pejabat pemerintah China, yaitu separatisme tidak lagi dianggap sebagai masalah individu tertentu, tapi masalah yang inheren pada budaya Uyghur dan Islam secara umum. Hal ini mengemuka manakala pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping mengetatkan kendali terhadap masyarakat sehingga kesetiaan terhadap Partai Komunis harus didahulukan ketimbang loyalitas kepada keluarga dan agama. Kondisi itu membuat identitas komunitas Muslim Uyghur menjadi sasaran kecurigaan. Apalagi ada sejumlah laporan bahwa ratusan orang Uyghur telah bertolak ke Suriah untuk bertempur bersama beberapa kelompok milisi. Kini sudah menjadi pemandangan umum ketika warga Uyghur digeledah di jalan-jalan dan pos-pos pemeriksaan kendaraan, sementara warga etnik Han kerap lolos dari pengecekan serupa (BBC News, 2018).

Pada tahun 2000, PKC mendirikan "Kelas Xinjiang". Kelas Xinjiang adalah program empat tahun yang bertujuan untuk memberikan masyarakat Uyghur pendidikan yang lebih lengkap, yang diajarkan oleh guru yang lebih berkualitas daripada yang mungkin tersedia di sekolah-sekolah di Xinjiang. Tahun pertama Kelas Xinjiang terdiri dari studi persiapan yang menekankan peningkatan bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris siswa. Selama tahun ini, kelas perbaikan juga ditawarkan dalam matematika, fisika, dan kimia. Setelah berhasil menyelesaikan studi persiapan, siswa mulai kursus normal mereka, dan

untuk semua yang bahasa China adalah bahasa pengantar. Kelas Xinjiang dikelola melalui kerja sama Kementerian Pendidikan (MOE), pemerintah XUAR, Kantor Administrasi Kelas Xinjiang, dan kantor pendidikan setempat dari kota-kota yang berpartisipasi. MOE membuat semua keputusan besar terkait kurikulum, pendaftaran, dan alokasi dana. Keputusan-keputusan ini kemudian dilakukan oleh Kantor Administrasi Kelas Xinjiang dan biro pendidikan kota-kota Kelas Xinjiang (Grose, 2010, pp. 101-102).

Tujuan implisit dari Kelas Xinjiang, yaitu untuk mendidik siswa dengan kurikulum pemerintah pro-China dan untuk menanamkan cita-cita kesatuan etnis, jelas didefinisikan dalam dokumen "Peraturan Administrasi untuk Kelas Xinjiang". Pasal 1 dokumen ini menyatakan: Agar Xinjiang melatih lulusan sekolah menengah yang berkualifikasi yang mendukung para pemimpin Partai Komunis Tiongkok, mencintai Tiongkok, mencintai sosialisme, membela persatuan Tiongkok, mempertahankan persatuan rakyat dan akan memunculkan semangat baru, menyadari kemampuan, dan bertekad menawarkan diri untuk pembangunan modernisasi sosialis. Kelas Xinjiang harus sepenuhnya melaksanakan pendidikan nasional dan kebijakan kelompok etnis serta melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Sekolah-sekolah Kelas Xinjiang akan mematuhi prinsip-prinsip sosialis diantaranya: menekankan karya pendidikan moral, Marxisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiao Ping dan teori Partai tentang masalah etnis sebagai panduan dan perhatian khusus yang akan diberikan pada penguatan dukungan untuk Partai Komunis Tiongkok, cinta untuk ibu pertiwi sosialis, menjunjung tinggi persatuan pendidikan Nasionalis Tiongkok, untuk memperkuat pendidikan persatuan rakyat yaitu Han tidak terpisahkan dari etnis

minoritas, etnis minoritas tidak dapat dipisahkan dari Han, dan setiap etnis minoritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Grose, 2010, p. 102).

**Tabel Pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang**

Jenis Pelanggaran HAM	Kasus	Keterangan
Strategi asimilasi dan isolasionis bangsa Uyghur oleh Beijing	imigrasi Han besar-besaran, persepsi diskriminasi sosiopolitik dan ekonomi terhadap Uyghur serta pengurangan drastis bagi kebebasan budaya dan agama Uyghur	Mengakibatkan meningkatnya kebencian dan frustrasi umum di antara para Uyghur kemudian menghasilkan banyak aksi kekerasan yang memuncak dengan kerusuhan Yili pada tahun 1997
Pnenahanan terhadap aktivis HAM Uyghur	Ilham Tohti, yang berasal dari minoritas Uyghur, sering mengkritik perlakuan China terhadap rakyat Uyghur. Dia dipenjara seumur hidup pada 2014.	China menuduh Tohti melakukan separatisme dan memicu ketegangan etnis. Tohti yang merupakan sarjana ekonomi memicu mendapat dukungan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, PBB, Uni Eropa dan AS menyerukan China membekaskannya.

Penganiayaan terhadap agama dan etnis budaya	Kebijakan agama yang membatasi pelatihan dan peran imam, perayaan Ramadan, dan partisipasi dalam haji.	Bulan April dan Juni 1996, sekitar empat ribu pelajar Agama ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp penjara selama kampanye Strike Hard.
Pembangunan sistem kamp interniran di luar pengadilan	Meningkatkan pengawasan terhadap penduduk dengan menggunakan teknologi canggih serta meningkatkan kehadiran polisi, dan mengeluarkan peraturan yang keras untuk membatasi ekspresi agama dan budaya	Ratusan ribu atau mungkin dua juta anggota etnis minoritas banyak dari mereka etnis Uyghur dan Kazakh ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang" di wilayah tersebut
Pembatasan berbicara, berkumpul, melakukan kegiatan keagamaan, informasi, dan komunikasi internasional dalam bidang Uyghur,	mengintensifkan penggunaan Mandarin di sekolah-sekolah. Lebih dari 1.000 orang di Xinjiang, termasuk wartawan Uyghur dan webmaster yang	Pasca kerusuhan Urumqi tahun 2009

	telah menerbitkan informasi sensitif, dilaporkan telah ditangkap dalam dua tahun terakhir atas tuduhan terkait dengan keamanan negara	
--	---	--

Peneliti Zenz menunjukkan bahwa fasilitas kamp pendidikan ulang bangunan berukuran melebihi 10.000 meter persegi , tetapi juga mirip dengan interniran atau kamp konsentrasi: dengan banyaknya pemasangan fitur keamanan komprehensif yang mengubah fasilitas yang ada menjadi seperti penjara: dinding di sekitarnya membentuk pagar keamanan, kawat tarik, barbwire, pintu dan jendela keamanan berjeruji, sistem pengawasan, sistem akses aman, menara pengawal, dan ruang jaga atau fasilitas untuk polisi bersenjata. Sejak masuknya Xinjiang ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Partai Komunis China (PKC) tidak pernah menolak untuk secara terang-terangan menindas oposisi etnis dan perbedaan pendapat. Memang, Beijing telah secara konsisten mengejar strategi integrasi yang agresif yang ditentukan oleh kontrol politik, sosial, dan budaya yang ketat, mendorong pemukiman Han China, dan pembangunan ekonomi yang dipimpin negara yang didukung oleh kemampuan represif dari layanan keamanan. Dengan begitu ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan praktik keagamaan dan budaya Uyghur serta

meningkatkan retorika perang rakyat melawan teroris Uyghur (Clarke, 2018).

Apa yang dilakukan pemerintah China terhadap masyarakat Xinjiang terutama kepada masyarakat Uyghur telah melanggar konstitusi China sendiri yang tertera pada pasal 35-40 konstitusi Republik Rakyat China (RRC).

- a. Pasal 35 mengatur kebebasan untuk berbicara, kebebasan pers, berkumpul, berserikat, dan berdemonstrasi.
- b. Pasal 36 mengatur kebebasan untuk beragama. dengan poin-poinnya yaitu: (1), warga negara Republik Rakyat China memiliki kebebasan dalam menganut kepercayaan keagamaan; (2), Tidak ada organisasi/lembaga negara, organisasi masyarakat atau perorangan dapat memaksa warga negara untuk percaya ataupun tidak percaya pada suatu agama ataupun tidak boleh terjadi diskriminasi kepada setiap orang yang percaya agama dengan orang yang tidak percaya agama; (3), negara melindungi aktivitas beragama, dan tidak ada seorangpun boleh menggunakan kegiatan beragama untuk merusak ketertiban umum, merusak kesehatan masyarakat, atau mengintervensi sistem pendidikan.
- c. Pasal 37 mengatur tentang kebebasan pribadi (*personal freedom*) dengan poin-poin yaitu: (1), kebebasan setiap warga negara tidak boleh diganggu gugat; (2), tidak ada seorangpun yang boleh ditangkap kecuali atas dasar perintah dari kejaksaan rakyat (*People's Procuratorate*) atau atas dasar perintah dari pengadilan rakyat (*People's Court*), dan

- penangkapannya harus dilaksanakan dan dilakukan oleh pejabat keamanan publik;
- (3), penghapusan atau pembatasan kebebasan pribadi yang tidak sesuai hukum (tidak sah) dengan cara penekanan atau cara-cara lain adalah dilarang, dan penyelidikan/penyidikan yang tidak sesuai hukum (tidak sah) dilarang.
- d. Pasal 38 menegaskan tentang kemuliaan martabat manusia. Ditegaskan bahwa kemuliaan martabat kemanusiaan warga negara RRC tidak dapat diganggu gugat. Penghinaan, fitnah/pencemaran nama baik, sangkaan bohong atau tuduhan palsu yang ditujukan langsung kepada warga negara dengan cara apapun dilarang. Sementara,
  - e. Pasal 39 mengatur tentang identitas rumah tempat tinggal. Dinyatakan bahwa rumah tempat tinggal warga negara adalah tidak dapat diganggu gugat. Memasuki rumah dengan melanggar hukum adalah dilarang.
  - f. Pasal 40 memuat kebebasan dan prevasi surat menyurat, tidak ada organisasi atau individu dengan alasan apapun dapat melanggar kebebasan dan prevasi surat menyurat kecuali atas alasan keamanan negara atau atas pemeriksaan perkara pidana, pejabat keamanan publik atau organ kejaksaan dibenarkan melakukan sensor terhadap surat menyurat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang (Diantha, 2016, pp. 16-17).

Partai Komunis China telah mengontrol birokrasi pemerintah, termasuk militer, polisi, dan pengadilan. Ini juga mempertahankan pegangan ketat

atas banyak aspek masyarakat dan kehidupan publik, termasuk media massa, internet, dan akademisi, hak asasi manusia termasuk hak untuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan agama, yang sangat dibatasi. Hal ini bermusuhan terhadap aktivis dari hak asasi manusia mereka yang berbicara menentang korupsi bagi mereka yang memprotes degradasi lingkungan dan menghukum mereka dengan pelecehan, penahanan, penyiksaan, dan penjara. Tingkat PKC terhadap kontrol sosial telah melalui siklus yang keras dengan periode sesekali relaksasi relatif. Presiden Xi Jinping, telah diantar dalam periode meningkatnya represi. Dia membatalkan batasan masa jabatan presiden pada bulan Maret 2018, menunjukkan niatnya untuk memerintah tanpa batas. Dia telah melembagakan membunuh undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional. yang lebih lanjut membatasi hak-hak rakyat, telah mendorong untuk melakukan “*Sinicize*” (yang, mengerahkan kontrol besar), dan memulai berbagai kampanye untuk menopang loyalitas kepada Partai Komunis (Human Rights Watch, 2019).